RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BERBEK

KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN BERBEK

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa Puji Syukur Kehadirat Alloh SWT karena atas Rahmatdan HidayahNya, sehingga dapat terselenggaranya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Berbek Tahun 2025-2029 Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk merupakan Rencana Strategis yang memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan masyarakat Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Demikian Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan sebagai acuan dan perbaikan bagi kegiatan kita semua. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dalam penyusunan rencana strategis di masa yang akan datang.

Berbek, 01 Oktober 2025

a.n. BUPATI NGANJUK
Camat Berbek

TONI SOESANTO.STP.M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19801123 199912 1 003

LAMPIRAN XXXII
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BERBEK
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak dari Pemerintahan Daerah yang langsung berhadapan (*face to face*) dengan masyarakat luas. Kinerja positif yang ditampilkan oleh Kecamatan akan membentuk citra positif dari birokrasi Pemerintahan secara keseluruhan.

Kecamatan sebagai *line office* dari Pemerintahan Daerah memiliki fungsi melayani kebutuhan masyarakat yang penuh dinamika, dimana didalamnya terdapat kompleksitas permasalahan masyarakat yang membutuhkan pelayanan prima dan aparatur pelayanan yang profesional. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan pemanfaatan potensi wilayah, banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, maupun tingkat heterogenitas masyarakat di wilayah kelurahan bawahan (pendidikan, pekerjaan, kemampuan ekonomi, kesehatan, dll).

Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance*, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berkualitas juga semakin besar. Guna merespon hal tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, menyeluruh serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Renstra Kecamatan Berbek Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029. Dengan

demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Berbek Tahun 2025-2029 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Berbek Tahun 2025-2029 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk.

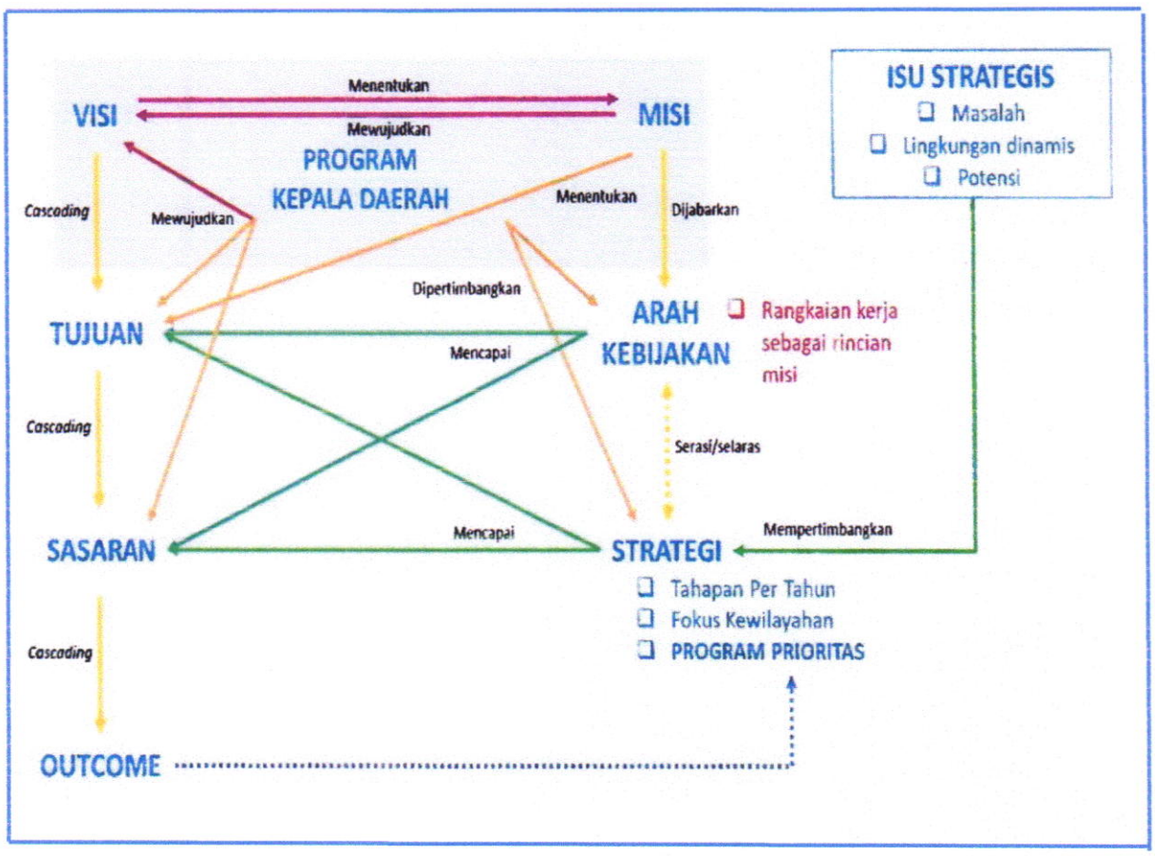
Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Berbek Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Berbek Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Berbek Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
2. Renstra Kecamatan Berbek Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Proses penyusunan Renstra Kecamatan diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renstra yang dilanjutkan dengan pemberian pembekalan tugas tim melalui kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis penyusunan Renstra serta kegiatan penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai bahan penyusunan Renstra. Proses selanjutnya berturut-turut adalah penyusunan Rancangan Teknokratik (Rantek), penyusunan Rancangan Awal (Ranwal), penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan (Rankhir) hingga penetapan Renstra dengan Peraturan Bupati.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 meliputi: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan; (3) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; (4) perumusan rancangan ; dan (5) penetapan Renstra Perangkat Daerah, dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah *(top-down)* dan bawah-atas *(bottom-up)* melalui Forum Perangkat Daerah untuk menyerap saran dan masukan dari pemangku kepentingan *(stakeholder)* atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD. Proses tersebut dapat diilustrasikan dalam bagan alir berikut:

Gambar 1.1.
Bagan Alur Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan Renja Perangkat Daerah adalah bahwa dalam penyusunan Renstra PD berpedoman pada Rencana Tata Ruang wilayah, RPJMD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi. Kemudian Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.

1.2.Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali ter dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menjabarkan arah perencanaan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2025-2029 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif Perangkat Daerah sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
b. Menjamin keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah;
c. Memberikan pedoman bagi seluruh Unit Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja PD;
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah, serta pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah.

1.1. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang;
1.2. Landasan Hukum;
1.3. Maksud dan Tujuan; dan
1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan
   a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
   b. Sumber Daya Perangkat Daerah;
   c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya
   d. Kelompok Sasaran Layanan;
   e. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan;
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Darah
   a. Identifikasi Permasalahan;
   b. Perumusan isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;
3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;
3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif;
4.2. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah;

4.3. Target Keberhasilan Pencapaian tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan

4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran umum Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk Kecamatan Berbek memiliki luas wilayah 4830,02 Ha yang terdiri dari tanah pertanian seluas 2294,61 Ha (47,51 %), tanah pekarangan yang digunakan untuk bangunan, halaman dan tegalan seluas 841,23 Ha (17,42 %), hutan seluas 1650,20 Ha (34,16 %) dan sisanya seluas 43,98 Ha (0,91 %) terdiri dari jalan, sungai, makam dll. Adapun letak kecamatan Berbek pada koordinat 11-45' – 112-13' BT dan 7-20' -7-50' LS.

Batas Wilayah Kecamatan Berbek meliputi :

- Sebelah Utara : Kecamatan Bagor dan Nganjuk
- Sebelah Timur : Kecamatan Loceret
- Sebelah Selatan : Kecamatan Ngetos dan Sawahan
- Sebelah Barat : Kecamatan Wilangan

Secara administratif, Kecamatan Berbek terdiri dari 19 desa yaitu:

1. Salamrojo
2. Cepoko
3. Maguan
4. Semare
5. Berbek
6. Mlilir
7. Bendungrejo
8. Sengkut
9. Ngrawan
10. Sumberwindu
11. Kacangan
12. Sendangbumen
13. Patranrejo
14. Sumberurip
15. Bulu
16. Grojogan
17. Tiripan
18. Balongrejo
19. Sonopatik

Adapun luas masing-masing desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	DESA	(LUAS KM2)
1.	SALAMROJO	**5,94**
2.	CEPOKO	**0.95**
3.	MAGUAN	**11,12**
4.	SEMARE	**1,22**
5.	BERBEK	**2,63**
6.	MLILIR	**1,91**
7.	BENDUNGREJO	**1,85**
8.	SENGKUT	**0,47**
9.	NGRAWAN	**1,03**
10.	SUMBERWINDU	**1,23**
11.	KACANGAN	**0,59**
12.	SENDANGBUMEN	**5,69**
13.	PATRANREJO	**1,16**
14.	SUMBERURIP	**4,12**
15.	B U L U	**2,13**
16.	GROJOGAN	**1,62**
17.	TIRIPAN	**1.21**
18.	BALONGREJO	**1,59**
19.	SONOPATIK	**1,85**
JUMLAH		**48,31**

Sumber : Kecamatan dalam angka (Statistik Kabupaten Nganjuk)

Data Demografi Penduduk di Kecamatan Berbek

Jumlah penduduk di Wilayah Kecamatan Berbek sebagai berikut:

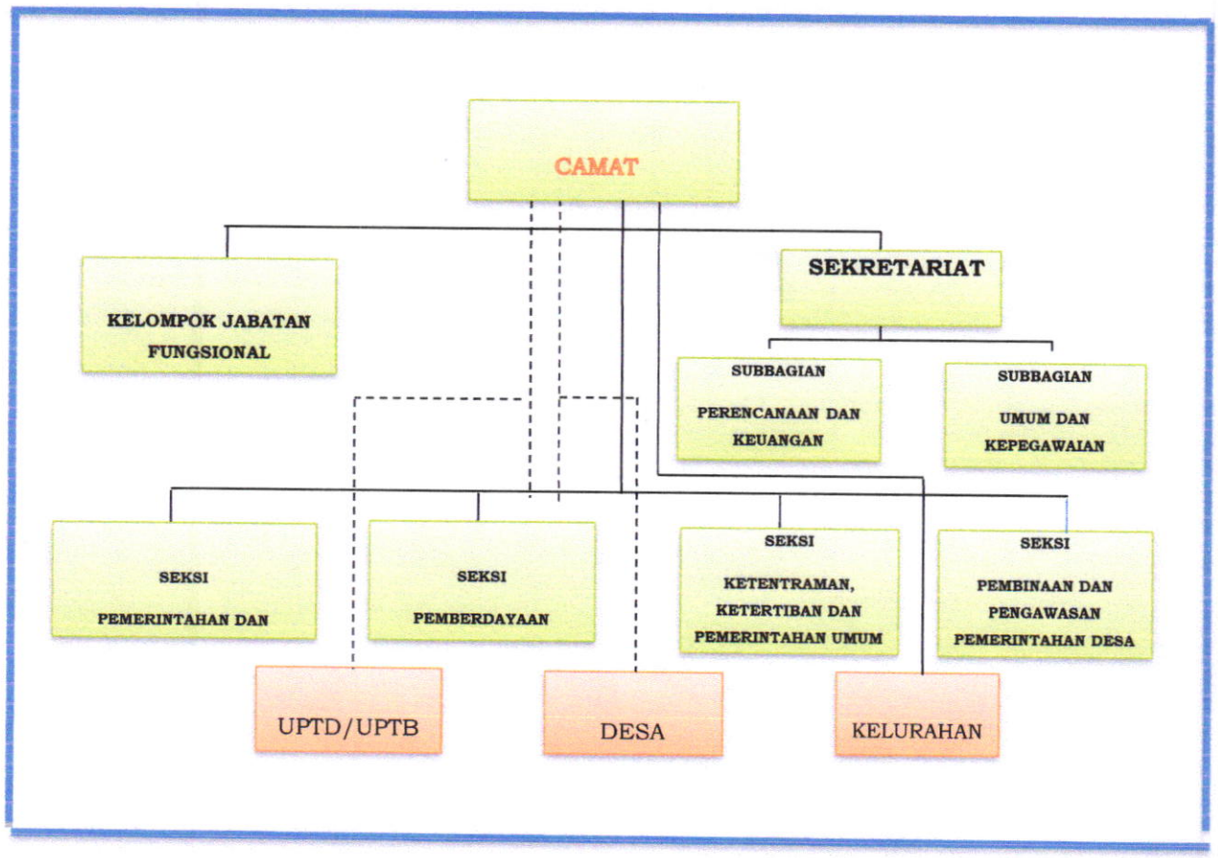
No.	Desa	Jumlah Penduduk		Jumlah
		L	P	(L + p)
1.	SALAMROJO	1.980	1.831	3.811
2.	CEPOKO	1.185	1.121	2.306
3.	MAGUAN	1.645	1.490	3135
4.	SEMARE	1..445	1.340	2.785
5.	BERBEK	2.914	2.828	5.742
6.	MLILIR	1.931	1.793	3.724
7.	BENDUNGREJO	1.620	1.546	3.166
8.	SENGKUT	1.394	1.323	2.717
9.	NGRAWAN	1.617	1.606	3.223
10.	SUMBERWINDU	1.621	1.665	3.286
11.	KACANGAN	1.059	1.066	2.125
12.	SENDANGBUMEN	2.354	2.241	4.595
13.	PATRANREJO	1.793	1.801	3.594
14.	SUMBERURIP	2.624	2.538	5.162
15.	B U L U	1.997	1.958	3.955
16.	GROJOGAN	1.966	1.788	3.754
17.	TIRIPAN	2.002	2.056	4.058
18.	BALONGREJO	2.429	2.308	4.737
19.	SONOPATIK	2.620	2.501	5.121
JUMLAH		36.198	34.806	71.004

Sumber Data SIAK Berbek 2025

a.Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);yang telah dituangkan dalam Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, berikut dijelaskan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi dari Kecamatan Berbek adalah:

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN



Sumber :Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022

1. Tugas Pokok

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

2. Fungsi

Camat menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
b. pengoordinasian penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
c. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
e. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
f. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
g. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
h. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Bupati; dan
i. pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

1.Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan teknis;
b. pengelolaan urusan keuangan;
c. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
d. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugasnya

1.Subbagian Perencanaan dan Keuangan Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

a) melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;

b) melaksanakan pengelolaan keuangan;

c) menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan

d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. - 156 –

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a) mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;

b) mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;

c) mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan;

d) melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;

e) melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;

f) melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan

g) melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

a. melaksanakan pengoordinasian/pensinergian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
b. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
c. melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
d. melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
e. melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
f. melaksanakan pengoordinasian/pensinergian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum;

g. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
h. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan;
i. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
j. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:
   a. melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;
   b. melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
   c. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
   d. melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
   e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
   f. melaksanakan evaluasi Kelurahan; dan
   g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Seksi Ketenteraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum Seksi Ketenteraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum mempunyai tugas:
   a. melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

a. b.melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
b. melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
c. melaksanakan koordinasian/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundangundangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
d. melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
e. melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;
f. melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
g. melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
i. melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakankewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertrikal;
j. melaksanakan tugas Forum Kordinasi Pimpinan di kecamatan; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

a. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;

b. melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;

c. melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; - 158 –

a. melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
b. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
c. melaksanakan fasiltasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
d. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawatan desa;
e. melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
f. melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan perdesaan;
g. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
h. melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
i. melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
j. melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
k. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan; dan
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b.Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.b.1.Sumber Daya Manusia

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. berikut:

2.1.b.2.Berdasarkan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural di Kecamatan Berbek sebanyak 8 (delapan), yang terisi sebanyak 6 (enam) jabatan struktural dan 2 (dua) jabatan struktural masih kosong dan dibantu oleh 10 (sepuluh) orang Pelaksana dan P3K. Dengan rincian sebagai berikut:

2.1.b.3.Berdasarkan Tingkat Pendidikan

2.1.b.4.Sarana Dan Peralatan Kerja Utama

Tabel 2.1.b.1.

Pegawai Pada Kecamatan Berbek
Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

No.	Nama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Camat	1		1
2.	Sekretaris Kecamatan	1		1
3.	Kepala Seksi	-	3	3
4.	Kasubbag	-	1	1
5.	Pelaksana/PNS	9	-	9
6.	PPPK	1		1
7.	Non ASN	3		3
Jumlah				19

Sumber : Aplikasi Simas Kab Nganjuk

2.1.b.2 Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di Kecamatan Berbek sebagai berikut :

Tabel 2.1.b.2

Pegawai Pada Kecamatan Berbek
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2025

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Laki- Laki	Perempuan	Jml. Pegawai
1.	Pembina TK I	IV/b	1		1
2.	Pembina	IV/a		1	1
3.	Penata Tingkat I	III/d	1	3	4
4.	Penata Muda	III/a	4		4
5.	Pengatur Tk. I	II/d	4		4
6.	Pengatur	II/c	1		1
7	PPPK	Gol/5	1		1
Jumlah					16

Sumber : Aplikasi Simas Kab Nganjuk

2.1.b.3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pegawai Kecamatan Berbek dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat mempunyai peranan, komposisi pegawai berdasar tingkat pendidikat sebagai berikut :

Tabel 2.1.b.3

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Berbek
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Ter Tahun 2025

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S2	1	2	3
2.	S1	3	2	5
3.	D3	1		1
4.	SMA	7		7
	JUMLAH			16

Sumber : Aplikasi Simas Kab Nganjuk

2.1.b.4.1 Sarana Dan Peralatan Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerja yang mendukung penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi :

1. Tanah untuk Kantor
2. Gedung Kantor 4 (empat) unit
   a.Gendung kantor dan pelayanan
   b.Pendopo Tempat rapat
   c.Rumah Dinas Camat
   d.Ruang PKK

3. Sarana alat transportasi yang meliputi :
   - Roda dua sebanyak 6 (empat) unit yaitu :
     - Honda Supra X125 Tahun 2007
     - Yamaha Vixion Tahun 2014
     - Honda win Tahun 1994 dan 1998
     - Yamaha Mio Gier Tahun 2024

4. Peralatan inventaris kantor lainnya sebagai berikut :
   - Meja Kerja /kayu : 15 buah
   - Meja kerja/layanan : 4 buah
   - Meja Panjang : 5 buah
   - Kursi kayu/besi : 35 buah

- Kursi Tunggu : 2 buah
- Kursi putar : 6 buah
- Komputer khusus KTP SIAK 2 (dua) unit
- Komputer : 6 (enam) unit
- Laptop : 6 (lima) unit
- Printer : 17 (Tujuh Belas) unit
- Scanner : 1 (satu) buah
- Alat studio : 4 unit
- AC : 7 unit
- TV : 2 Unit
- Alat dapur/ : 5 Unit
- Lemari/rak buku : 14 unit
- Brangkas : 2 buah
- Kamera : 1 buah

Sumber dari sim-aset kabupaten nganjuk

c.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Berbek dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel 2.1.c.1 dan Tabel 2.1.c.2. dengan format sebagai berikut

Tabel 2.1.c.1.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai 85 (kategori Baik)	61,6 (kategori Baik)

Sumber :aplikasi sincan tahun 2024

No.	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target SPM atau NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Capaian Tahun		Rasio Capaian pada tahun	
					2024	2025	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	85	85	-	82	84	82.5	84,05 -	100.6%	84,05
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	90	20	-	80	82	84	14.5	105%	14.5

Sumber: Laporan Evaluasi Renstra PD Tahun 2024-2025 Beserta Perubahannya dan capaian Sampai tribulan III Tahun 2025

Tabel 2.1.c.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun		Rata-rata Pertumbuhan	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	Anggaran	Realiasasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(11)	(12)	(15)	(16)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,384,193,700	2,367,239,393	2,236,902,076	1.626.557.757	93.82%	54%	1.626.557.757	5%
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100,662,800	72,974,800	84,483,382	39.395.000	83.93%	89,18%	39.395.000	3%
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	188,411,520	55,544,600	165,614,810	49.039.700	87.90%	52,99%	49.039.700	5%

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun		Rata-rata Pertumbuhan	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	Anggaran	Realiasasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(11)	(12)	(15)	(16)
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	93,964,600	66,621,800	85,557,000	64.499.500	91.05%	77.60%	64.499.500	3%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	125,164,650	87,607,000	121,980,000	40.416.000	97.46%	65,08%	40.416.000	3%
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	251,696,000	205,808,500	214,924,100	59.949.750	85.39%	86.01%	59.949.750	5%

Sumber: LRA Perangkat Daerah) Tahun 2024 dan tahun 2025 sampai dengan tribulan III*

**) Kecamatan Berbek*

***) Unsur Kewilayahan*

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.1.c.3
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dari Tabel 2.3.2., kita dapat mengetahui bahwa pada semua target telah terpenuhi. Target yang terpenuhi adalah terjadi karena dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak dan stakeholder di Kecamatan Berbek.

dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama *(core bussiness)* dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Tabel 2.1.c.1 **Data Fasilitas Pendidikan Formal dan Non Formal di Kecamatan Berbek**

No	Desa	PAUD/TK	SD/MI	SMP/MTS	SMA/MA	Perguruan Tinggi	Ponpes	Pendidikan Kesetaraan	Kelompok Belajar/Pamong Belajar	Perpustakaan
1	Salamrojo	3	2	-	-	-	-	-	-	-
2	Cepoko	2	2	1	1	-	3	-	-	1
3	Maguan	3	1	-	-	-	-	-	-	-
4	Semare	3	1	-	-	-	-	-	-	-
5	Berbek	4	5	1	-	-	-	-	-	1
6	Ngrawan	2	2	1	-	-	-	-	-	-
7	Sengkut	2	1	1	1	-	-	-	-	1
8	Bendungrejo	3	2	-	-	-	1	-	-	-
9	Mlilir	3	2	-	-	-	1	-	-	-
10	Kacangan	1	1	-	-	-	-	-	-	-
11	Sumberwindu	1	2	1	-	-	-	-	-	1
12	Sendangbumen	3	1	-	1	-	-	-	-	1
13	Patranrejo	2	1	1	-	-	-	-	-	-
14	Tiripan	2	2	1	-	-	-	-	-	1
15	Sumberurip	5	3	-	-	-	-	-	-	1
16	Bulu	2	1	-	-	-	2	-	-	1
17	Grojogan	2	1	-	-	-	-	-	-	1
18	Sonopatik	3	2	-	-	-	1	-	-	1
19	Balongrejo	1	1	-	-	-	1	-	-	3
	JUMLAH	47	32	7	3	-	9	-	-	13

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan pelayanan Publik Tahun 2025

Tabel 2.1.c.2 **Data Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Berbek**

No	Desa	Rumah Sakit	Puskesmas	Klinik	Pustu	Polindes	Apotik
1	Salamrojo	-	-	-	-	1	-
2	Cepoko	-	-	-	1	1	-
3	Maguan	-	-	-	-	1	-
4	Semare	-	-	-	-	1	-
5	Berbek	-	1	-	-	1	-
6	Ngrawan	-	-	-	-	1	-
7	Sengkut	-	-	-	-	1	3
8	Bendungrejo	-	-	-	-	1	-
9	Mlilir	-	-	-	-	1	-
10	Kacangan	-	-	1	-	1	1
11	Sumberwindu	-	-	-	-	1	-
12	Sendangbumen	-	-	-	-	1	-
13	Patranrejo	-	-	-	-	1	-
14	Tiripan	-	-	-	1	1	-
15	Sumberurip	-	-	-	-	1	-
16	Bulu	-	-	-	-	1	-
17	Grojogan	-	-	-	1	-	1
18	Sonopatik	-	-	-	-	1	1
19	Balongrejo	-	-	-	-	1	-
	JUMLAH		1	1	3	18	6

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan pelayanan Publik tahun 2025

Tabel 2.1.c.3 **Data Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan Berbek**

No	Desa	RT	RW	BPD	LPM	Posyandu ILP	Karang Taruna	Linmas (orang)
1	SALAMROJO	23	7	1	1	1	1	31 orang
2	CEPOKO	16	6	1	1	1	1	31 orang
3	MAGUAN	18	9	1	1	1	1	31 orang
4	SEMARE	16	6	1	1	1	1	31 orang
5	BERBEK	43	7	1	1	1	1	31 orang
6	MLILIR	24	6	1	1	1	1	31 orang
7	BENDUNGREJO	19	9	1	1	1	1	31 orang
8	SENGKUT	21	7	1	1	1	1	31 orang
9	NGRAWAN	16	8	1	1	1	1	31 orang
10	SUMBERWINDU	16	8	1	1	1	1	31 orang
11	KACANGAN	12	4	1	1	1	1	31 orang
12	SENDANGBUMEN	27	11	1	1	1	1	31 orang
13	PATRANREJO	14	7	1	1	1	1	31 orang
14	SUMBERURIP	26	10	1	1	1	1	31 orang
15	BULU	27	10	1	1	1	1	31 orang

16	GROJOGAN	20	8	1	1	1	1	31 orang
17	TIRIPAN	35	5	1	1	1	1	31 orang
18	BALONGREJO	24	5	1	1	1	1	31 orang
19	SONOPATIK	25	5	1	1	1	1	31 orang

Sumber Data : Seksi Pemberdayaan Masyarakat TAHUN 2025

Tabel 2.1.c.4 **Data Lembaga Ekonomi Desa di Kecamatan Berbek**

No	Desa	BUM Desa	Bumdesma	Pasar	Koperasi	Kopwan	LKM
1	SALAMROJO	1	-	-	-	-	-
2	CEPOKO	1	-		-	Aktif	-
3	MAGUAN	1	-		-	-	-
4	SEMARE	1	-		-	-	-
5	BERBEK	1	-	1	-	-	-
6	MLILIR	1	-		-	-	-
7	BENDUNGREJO	1	-		-	-	-
8	SENGKUT	1	-		-	-	-
9	NGRAWAN	1	-		-	Aktif	-
10	SUMBERWINDU	1	-		-	Aktif	-
11	KACANGAN	1	1		1	Aktif	-
12	SENDANGBUMEN	1	-		-	Aktif	-
13	PATRANREJO	1	-		-	Aktif	-
14	SUMBERURIP	1	-	1	-	-	-
15	BULU	1	-		-	-	-
16	GROJOGAN	1	-	1	-	Aktif	-
17	TIRIPAN	1	-		-	-	-
18	BALONGREJO	1	-		-	Aktif	-
19	SONOPATIK	1	-		-	Aktif	-

Sumber Data : Seksi Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025

Tabel 2.1.c.5 **Data Infrastruktur Desa di Kecamatan Berbek**

No	Desa	Jalan (km)	Jembatan (unit)	Drainase (km)	Embung
1	Salamrojo	7	4	1.5	-
2	Cepoko	3	8	3	-
3	Maguan	5	3	2	-
4	Semare	3	6	5	-
5	Berbek	2.5	7	1.5	-
6	Ngrawan	5.2	6	3.8	1
7	Sengkut	6.2	3	1.6	-
8	Bendungrejo	3	5	2	1
9	Mlilir	10	7	3	1
10	Kacangan	3	3	2	-
11	Sumberwindu	2.9	11	3.6	2
12	Sendangbumen	8.5	12	7.5	-
13	Patranrejo	5	11	4	-
14	Tiripan	5	6	4	-
15	Sumberurip	4.75	5	5.21	-
16	Bulu	10.7	3	5	-
17	Grojogan	4.5	1	5.3	-
18	Sonopatik	7	4	3.5	-
19	Balongrejo	2.9	6	3.6	3
	JUMLAH	99.15	111	67.11	8

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Tahun 2025

Tabel 2.1.c.6 **Data Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Berbek**

No	Desa	LSM	Organisasi Masyarakat	Organisasi Profesi	Organisasi Keagamaan
1	SALAMROJO	-	PSHT DAN PN		NU,Muslimat,Ansor,Fatayat,IPNU,IPPNU
2	CEPOKO	-	PSHT DAN PN		NU,Muslimat,Ansor,Fatayat,IPNU,IPPNU
3	MAGUAN	-	PSHT DAN PN		NU,Muslimat,Ansor,Fatayat,IPNU,IPPNU
4	SEMARE	-	PSHT DAN PN		NU,Muslimat,Ansor,Fatayat,IPNU,IPPNU
5	BERBEK	-	PSHT PN,PSHW		NU,Muslimat,Ansor,Fatayat,IPNU,IPPNU
6	MLILIR	-	PSHT DAN PN		NU,Muslimat,Ansor,Fatayat,IPNU,IPPNU
7	BENDUNGREJO	-	PSHT DAN PN		NU,Muslimat,Ansor,Fatayat,IPNU,IPPNU
8	SENGKUT	-	PSHT DAN PN		NU,Muslimat,Ansor,Fatayat,IPNU,IPPNU
9	NGRAWAN	-	PSHT DAN PN		NU,Muslimat,Ansor,Fatayat,IPNU,IPPNU
10	SUMBERWINDU	-	PSHT DAN PN		NU,Muslimat,Ansor,Fatayat,IPNU,IPPNU
11	KACANGAN	-	PSHT DAN PN,ASAD		NU,Muslimat,Ansor,Fatayat,IPNU,IPPNU
12	SENDANGBUMEN		PSHT DAN PN		NU,Muslimat,Ansor,Fatayat,IPNU,IPPNU
13	PATRANREJO		PSHT DAN PN		NU,Muslimat,Ansor,Fatayat,IPNU,IPPNU
14	SUMBERURIP		PSHT DAN PN		NU,Muslimat,Ansor,Fatayat,IPNU,IPPNU
15	B U L U		PSHT DAN PN		NU,Muslimat,Ansor,Fatayat,IPNU,IPPNU
16	GROJOGAN		PSHT DAN PN		NU,Muslimat,Ansor,Fatayat,IPNU,IPPNU
17	TIRIPAN		PSHT DAN PN		NU,Muslimat,Ansor,Fatayat,IPNU,IPPNU
18	BALONGREJO		PSHT DAN PN		NU,Muslimat,Ansor,Fatayat,IPNU,IPPNU
19	SALAMROJO		PSHT DAN PN		NU,Muslimat,Ansor,Fatayat,IPNU,IPPNU

Sumber Data : Seksi Trantib dan Pemerintahan Umum Tahun 2025

Tabel 2.1.c.7 **Data Jumlah Gangguan Trantibum di Kecamatan Berbek Tahun 2024**

No	Desa	Anjal/gepeng	minuman beralkohol	Galian Minerba	Penertiban Reklame	Penertiban PKL	Penertiban IMB	Perkalahian
1	SALAMROJO	-	-	-	-	-	-	-
2	CEPOKO	-	-	-	-	-	-	1
3	MAGUAN	-	-	-	-	-	-	-
4	SEMARE	-	-	-	-	-	-	1
5	BERBEK	-	-	-	-	-	-	1
6	MLILIR	-	-	-	-	-	-	-
7	BENDUNGREJO	-	-	-	-	-	-	-
8	SENGKUT	-	-	-	-	-	-	-
9	NGRAWAN	-	-	-	-	-	-	2
10	SUMBERWINDU	-	-	-	-	-	-	-
11	KACANGAN	-	-	-	-	-	-	1
12	SENDANGBUMEN							-
13	PATRANREJO	-	-	-	-	-	-	-
14	SUMBERURIP	-	-	-	-	-	-	-
15	B U L U	-	-	-	-	-	-	-
16	GROJOGAN	-	-	-	-	-	-	-
17	TIRIPAN	-	-	-	-	-	-	-

18	BALONGREJO	-	-	-	-	-	-	-
19	SALAMROJO	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH							6

Tabel 2.1.c.8 **Data konflik sosial di Kecamatan Berbek Tahun 2024**

No	Kecamatan	Jumlah Konflik social di Kec. Berbek
		NIHIL

Sumber Data : Seksi Trantib dan Pemerintahan Umum

Tabel 2.1.c.9 **Data Pembinaan desa dan kelurahan di Kecamatan Berbek Tahun 2024**

No	Desa	RPJMDesa (Jumlah Dokumen)	RKPDesa (Jumlah Dokumen)	APBDesa (Jumlah Dokumen)	LPPDes (Jumlah Dokumen)	LKPDes (Jumlah Dokumen)	IPPDes (Jumlah Dokumen)	RKA Desa (Jumlah Dokumen)	Laporan Keuangan Desa (Jumlah Dokumen)
1	SALAMROJO	1	1	1	1	1	1	1	1
2	CEPOKO	1	1	1	1	1	1	1	1
3	MAGUAN	1	1	1	1	1	1	1	1
4	SEMARE	1	1	1	1	1	1	1	1
5	BERBEK	1	1	1	1	1	1	1	1
6	MLILIR	1	1	1	1	1	1	1	1
7	BENDUNGREJO	1	1	1	1	1	1	1	1
8	SENGKUT	1	1	1	1	1	1	1	1
9	NGRAWAN	1	1	1	1	1	1	1	1
10	SUMBERWINDU	1	1	1	1	1	1	1	1
11	KACANGAN	1	1	1	1	1	1	1	1

12	SENDANGBUMEN	1	1	1	1	1	1	1	1
13	PATRANREJO	1	1	1	1	1	1	1	1
14	SUMBERURIP	1	1	1	1	1	1	1	1
15	BULU	1	1	1	1	1	1	1	1
16	GROJOGAN	1	1	1	1	1	1	1	1
17	TIRIPAN	1	1	1	1	1	1	1	1
18	BALONGREJO	1	1	1	1	1	1	1	1
19	SONOPATIK	1	1	1	1	1	1	1	1
JUMLAH		19	19	19	19	19	19	19	19

Sumber Data : Seksi Binwas Desa Tahun 2024

Tabel 2.1.c.10 **Data Jenis Pelayanan Paten di Kecamatan Berbek Tahun 2024**

No	Jenis Pelayanan	Tahun 2024
1	Kecamatan Sehat	1
2	Kecamatan Layak Anak	2
3	Pengarusutamaan dan Kesetaraan Gender	2
4	Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	1
5	Fasilitasi dan Koordinasi Pemungutan PBB	12
6	Kemiskinan	3

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tabel 2.1.c.11 **data Jenis Pelayanan Paten di Kecamatan Berbek Tahun 2024**

No	Jenis Pelayanan	Tahun 2024
1	Adminduk	753
2	Perijinan	0
3	Administrasi lainnya	602

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

2.1.e Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan

Mitra Kecamatan Berbek dalam pemberian layanan adalah Koramil dan Polsek sebagai mitra kecamatan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan umum, yang bertugas: Koordinasi dan fasilitasi dan sinergitas

2.1.e.1Tabel data Mitra Perangkat Daerah

No	Mitra	Jumlah Pengaduan	ket
1	Polsek	5	Terselesaikan
2	Koramil	5	Terselesaikan

Sumber laporan Kasi trantib Tahun 2024

2.2 Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.a Identifikasi Permasalahan

Pengidentifikasian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Berbek menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT/*Strenght, Weakness, Opportunity and Threath*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strong*)

1) Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020. Dalam Peraturan Daerah ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Berbek;
2) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3) Pola kerja di Kecamatan Berbek yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas–tugas di Kecamatan;
6) SDM Aparatur Kecamatan yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
2) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang

ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.

3) Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan.
4) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah tertata dengan baik;
2) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain, Koramil, Polsek dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat;
4) serta masyarakat yang aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

b. Faktor Ancaman (*Threat*)

1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2) Masih adanya kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat.

Identifikasi permasalahan disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2.a
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Belum optimalnya sinergi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	• Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public masih kurang • Belum optimalnya akuntabilitas kinerja kecamatan	• Keterbatasan sarana prasarana pendukung pelayanan publik • Kekurang selarasan antara perencanaan dan penganggaran dengan pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
		Belum efektifnya koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib	• Hubungan kelembagaan antar perangkat daerah belum efektif • Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan • Keterbatasan kewenangan Camat dalam pembinaan pemerintahan Desa
		Penerapan atau implementasi tata kelola pemerintahan desa belum optimal.	• Kurang tertibnya administrasi pemerintahan desa

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan di Kecamatan Berbek, maka dalam pembuatan Renstra Perangkat Daerah perlu untuk memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Agar penyusunan rencana strategis dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana strategi yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakehoders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

2.2.b Perumusan Isu-isu Strategis

Pada Subbab 2.2.a sudah dijelaskan mengenai Permasalahan-permasalahan yang muncul pada Pelayanan Perangakt Daerah khususnya Kecamatan Berbek, yang ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah.

Dengan demikian, pada bagian ini akan dijelaskan mengenai isu-isu strategis pada Kecamatan Berbek, yaitu:

1) *Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.* Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;

2) *Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.* Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan.

3) *Pelayanan Prima.* Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada nya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

4) *Peningkatan Sinergitas Kecamatan.*

   Peningkatan sinergitas kecamatan mendorong kesinambungan organisasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara antar pemerintahan di wilayah Kecamatan Berbek guna mempercepat pelaksanaan pembangunan. Serta mengembangkan berbagai kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan program pembangunan guna peningkatan kesejateraan masyarakat. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Baik serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.

TABEL 2.2.b TEKNIK MENYIMPULKAN ISU STRATEGIS

KECAMATAN BERBEK

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DEGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS KECAMATAN
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalaui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan	peningkatan ekonomi lokal, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas SDM, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan	ketahanan terhadap perubahan iklim, kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan, serta keberlanjutan sumber daya alam	konflik bersenjata, ancaman lingkungan seperti perubahan iklim dan cuaca ekstrem, disinformasi dan polarisasi sosial, ketimpangan ekonomi, dan potensi kemerosotan ekonomi global	pengentasan kemiskinan ekstrem, pengembangan infrastruktur dan digitalisasi desa, peningkatan kualitas SDM, ketahanan pangan, pengelolaan lingkungan, pencegahan stunting, serta penguatan BUMDes	peningkatan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur antarwilayah, penanggulangan kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi lokal	*Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah*
.						*Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.*
						Pelayanan Prima
						Peningkatan Sinergitas Kecamatan

BAB III
TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1.Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan, tugas utama Camat adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Berdasarkan tugas utama kecamatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 - 2029, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Berbek dalam 5 (Tahun) tahun ke depan dapat ditetapkan mendukung *MISI 2 :* ***Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalaui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan*** TUJUAN : ***Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik*** SASARAN : ***Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah"***

Adapun ***Tujuan*** Kecamatan **Berbek** adalah *Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan*, yang diukur dengan Indikator Kinerja Tujuan yaitu berupa *Indeks Sinergitas Kecamatan* (Nilai)

3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Rentra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Adapun strategi atau teknik untuk mencapai sasaran yang diharapkan oleh pimpinan Kecamatan Berbek dalam menjalankan roda pemerintahan daerah di kecamatan dan di desa/kelurahan antara lain:

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib
3. Melakukan pembinaan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang berkelanjutan

Sedangkan Arah kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum didalam RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dan berdasarkan penjabaran visi dan misi Kecamatan Berbek, selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan, serta evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah
3. Meningkatkan pengendalian intern perangkat daerah
4. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemungutan PBB
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemerintahan desa
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
7. Meningkatkan koordinasi dan sinergi tiga pilar untuk menjaga ketentraman, ketertiban umum dan kondusifitas keamanan wilayah
8. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi wawasan kebangsaan
9. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan Kepala Daerah
10. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penanganan kemiskinan daerah, pengarusutamaan dan kesetaraan gender, kecamatan layak anak, Kecamatan Sehat.
11. Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pendampingan perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan desa
12. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemilihan dan pelantikan kepala desa, perangkat desa BPD dan LPM

Berikut rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2025-2029 sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Sasaran RPJMD : - Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	a. Meningkatnya efektifitas koordinasi pemerintahan di kecamatan b. Meningkatnya efektifitas koordinasi pelayanan publik di kecamatan c. Meningkatnya efektifitas koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di kecamatan d. Meningkatnya efektifitas koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	a. Terlaksananya koordinasi kegiatan pemerintahan dengan unit pelaksana teknis dinas/badan, intansi vertikal, dan lintas sektor b. Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan pelayanan kepada c. Terlaksananya fasilitasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum d. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan e. Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	a. Meningkatnya efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan b. Meningkatnya efektifitas koordinasi	a. Meningkatnya efektifitas koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan b. Meningkatnya efektifitas

		upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan c. Meningkatnya efektifitas koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan c. Meningkatnya efektifitas koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan
	Meningkatnya tertib administrasi desa	a. Meningkatnya efektifitas koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan b. Meningkatnya efektifitas koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	a. Meningkatnya efektifitas koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan b. Meningkatnya efektifitas koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RENSTRA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Berbek											
- Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan		Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)	84,5	85	85	86	87	88	88	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan (Nilai)	84,5	85	85,5	85,6	85,7	86	86,5	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (%)	89	20	20	20	20	15	15	
		Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)	90	91	92	95	95	95	95	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pendanaan indikatif;

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Berbek selama 5 tahun ke depan (2025-2029) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Berbek. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Berbek akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Nganjuk selama 5 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun programnya antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN

RENSTRA PD

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Berbek							
- Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan				Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik			Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan (Nilai)		
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun (Laporan)	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KETERANGAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	7.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	

					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KETERANGAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KETERANGAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KETERANGAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Berbek		Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Berbek		Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase tindak lanjut hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan (%)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	

					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan Berbek		Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah laporan hasil koordinasi Kegiatan pemerintahan dengan unit pelaksana teknis dinas/badan, intansi vertikal, dan lintas sector(Laporan)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Berbek		Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				persentase tindaklanjut hasil koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di kecamatan (%)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	

					Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan			Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (%)		
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Berbek		Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (laporan)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KETERANGAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Berbek		Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	

					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KETERANGAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Berbek		Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase tindak lanjut hasil koordinasi penerapan dan penegakan perda dan perkada di kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
		Meningkatnya tertib administrasi desa			Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)		

			Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Berbek		Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Desa dengan tertib administrasi kelembagaan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
			Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di kecamatan Berbek		Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	

TABEL 4.2 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN					3.859.613.483		3.859.613.483		3.859.613.483		3.859.613.483		3.861.613.483	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.079.813.683		3.079.813.683		3.079.813.683		3.079.813.683		3.081.813.683	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	65	65	70	3.079.813.683	70	3.079.813.683	75	3.079.813.683	75	3.079.813.683	80	3.081.813.683	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Berbek	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)	80	80	85	90.000.000	85	90.000.000	85	90.000.000	85	90.000.000	85	90.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan Berbek	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	85	85	85	10.000.000	85	10.000.000	85	10.000.000	85	10.000.000	85	10.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Berbek	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan (%)	85	85	85	10.000.000	85	10.000.000	85	10.000.000	85	10.000.000	85	10.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					156.783.800		156.783.800		156.783.800		156.783.800		156.783.800	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Berbek	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	95	95	95	156.783.800	95	156.783.800	95	156.783.800	95	156.783.800	95	156.783.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					123.266.000		123.266.000		123.266.000		123.266.000		123.266.000	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Berbek	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)	100	100	100	73.266.000	100	73.266.000	100	73.266.000	100	73.266.000	100	73.266.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Berbek	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan (%)	90	90	90	50.000.000	90	50.000.000	90	50.000.000	90	50.000.000	90	50.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					189.750.000		189.750.000		189.750.000		189.750.000		189.750.000	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Berbek	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	100	100	100	189.750.000	100	189.750.000	100	189.750.000	100	189.750.000	100	189.750.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Berbek	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa (%)	100	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di kecamatan Berbek	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					3859613483.00		3859613483.00		3859613483.00		3859613483.00		3861613483.00	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01 - KECAMATAN				3.859.613.483		3.859.613.483		3.859.613.483		3.859.613.483		3.861.613.483		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.079.813.683		3.079.813.683		3.079.813.683		3.079.813.683		3.081.813.683		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	65	70	3.079.813.683	70	3.079.813.683	75	3.079.813.683	75	3.079.813.683	80	3.081.813.683	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Berbek	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			

	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	4		4		4		4		4		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000		

7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	
7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.512.211.983		2.512.211.983		2.512.211.983		2.512.211.983		2.514.211.983	
Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun (Laporan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	17	18	2.512.211.983	18	2.512.211.983	2	2.512.211.983	2	2.512.211.983	2	2.514.211.983	

	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18		18		18		18		18		
	Jumlah Laporan Keuangan Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	40	40		40		40		40		40		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	4		4		4		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.494.211.983		2.494.211.983		2.494.211.983		2.494.211.983		2.494.211.983		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	17	18	2.494.211.983	18	2.494.211.983	2	2.494.211.983	2	2.494.211.983	2	2.494.211.983		
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		

Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	40	40	2.000.000	40	2.000.000	40	2.000.000	40	2.000.000	40	2.000.000		
7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun SKPD				4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahun SKPD (Laporan)	1	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000		
7.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		4.000.000		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	4	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	4.000.000		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18	3.000.000	18	3.000.000	18	3.000.000	18	3.000.000	18	3.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		
Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	14	14		14		14		14		14			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
7.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		

Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000		
7.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000		
7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	14	14	1.000.000	14	1.000.000	14	1.000.000	14	1.000.000	14	1.000.000		
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				226.229.200		226.229.200		226.229.200		226.229.200		226.229.200		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5	5	226.229.200	5	226.229.200	5	226.229.200	5	226.229.200	5	226.229.200		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			

	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3	3		3		3		3		3		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	12		12		12		12		12		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10		10		10		10		10		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4		
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	7.500.000	4	7.500.000	4	7.500.000	4	7.500.000	4	7.500.000	
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				92.424.200		92.424.200		92.424.200		92.424.200		92.424.200	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	12	92.424.200	12	92.424.200	12	92.424.200	12	92.424.200	12	92.424.200	
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	

7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				4.200.000		4.200.000		4.200.000		4.200.000		4.200.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	4.200.000	12	4.200.000	12	4.200.000	12	4.200.000	12	4.200.000		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				97.105.000		97.105.000		97.105.000		97.105.000		97.105.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5	5	97.105.000	5	97.105.000	5	97.105.000	5	97.105.000	5	97.105.000		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		
Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	6	80.000.000	6	80.000.000	6	80.000.000	6	80.000.000	6	80.000.000		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	4		4		4		4		4			
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		

Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				66.072.000		66.072.000		66.072.000		66.072.000		66.072.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	66.072.000	12	66.072.000	12	66.072.000	12	66.072.000	12	66.072.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60	60		60		60		60		60			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60	60	5.000.000	60	5.000.000	60	5.000.000	60	5.000.000	60	5.000.000		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				61.072.000		61.072.000		61.072.000		61.072.000		61.072.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	61.072.000	12	61.072.000	12	61.072.000	12	61.072.000	12	61.072.000		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				173.300.500		173.300.500		173.300.500		173.300.500		173.300.500		
Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	4	173.300.500	4	173.300.500	4	173.300.500	4	173.300.500	4	173.300.500		
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5	10		10		10		10		10			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3		3		3		3		3			

	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6	6		6		6		6		6		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6	6	75.000.000	6	75.000.000	6	75.000.000	6	75.000.000	6	75.000.000		
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				78.300.500		78.300.500		78.300.500		78.300.500		78.300.500		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	78.300.500	3	78.300.500	3	78.300.500	3	78.300.500	3	78.300.500		

7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan Berbek	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	85	85	10.000.000	85	10.000.000	85	10.000.000	85	10.000.000	85	10.000.000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Berbek	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Jumlah laporan hasil koordinasi Kegiatan pemerintahan dengan unit pelaksana teknis dinas/badan, intansi vertikal, dan lintas sector(Laporan)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	16	16	10.000.000	16	10.000.000	16	10.000.000	16	10.000.000	16	10.000.000		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	16	16	10.000.000	16	10.000.000	16	10.000.000	16	10.000.000	16	10.000.000		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Berbek	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan (%)	85	85	10.000.000	85	10.000.000	85	10.000.000	85	10.000.000	85	10.000.000		
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
persentase tindaklanjut hasil koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di kecamatan (%)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	85	85	10.000.000	85	10.000.000	85	10.000.000	85	10.000.000	85	10.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	85	85	10.000.000	85	10.000.000	85	10.000.000	85	10.000.000	85	10.000.000		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Berbek	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)	80	85	90.000.000	85	90.000.000	85	90.000.000	85	90.000.000	85	90.000.000		
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	16	16	90.000.000	16	90.000.000	16	90.000.000	16	90.000.000	16	90.000.000		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	16	16	90.000.000	16	90.000.000	16	90.000.000	16	90.000.000	16	90.000.000		

7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				156.783.800		156.783.800		156.783.800		156.783.800		156.783.800		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Berbek	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	95	95	156.783.800	95	156.783.800	95	156.783.800	95	156.783.800	95	156.783.800	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Berbek	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				156.783.800		156.783.800		156.783.800		156.783.800		156.783.800		
Persentase tindak lanjut hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan (%)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	11	11	156.783.800	11	156.783.800	11	156.783.800	11	156.783.800	11	156.783.800		
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	4	4		56		56		56		56			
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	11	11	75.000.000	11	75.000.000	11	75.000.000	11	75.000.000	11	75.000.000		

7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				56.783.800		56.783.800		56.783.800		56.783.800		56.783.800	
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	4	4	56.783.800	56	56.783.800	56	56.783.800	56	56.783.800	56	56.783.800	
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				123.266.000		123.266.000		123.266.000		123.266.000		123.266.000	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Berbek	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan (%)	90	90	50.000.000	90	50.000.000	90	50.000.000	90	50.000.000	90	50.000.000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Berbek
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Persentase tindak lanjut hasil koordinasi penerapan dan penegakan perda dan perkada di kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	2	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	

Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	2	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Berbek	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)	100	100	73.266.000	100	73.266.000	100	73.266.000	100	73.266.000	100	73.266.000		
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				73.266.000		73.266.000		73.266.000		73.266.000		73.266.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (laporan)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	24	24	73.266.000	24	73.266.000	24	73.266.000	24	73.266.000	24	73.266.000		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				36.633.000		36.633.000		36.633.000		36.633.000		36.633.000		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	24	24	36.633.000	24	36.633.000	24	36.633.000	24	36.633.000	24	36.633.000		

7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				36.633.000		36.633.000		36.633.000		36.633.000		36.633.000	
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	2	2	36.633.000	2	36.633.000	2	36.633.000	2	36.633.000	2	36.633.000	
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				189.750.000		189.750.000		189.750.000		189.750.000		189.750.000	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Berbek	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	100	100	189.750.000	100	189.750.000	100	189.750.000	100	189.750.000	100	189.750.000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Berbek
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				189.750.000		189.750.000		189.750.000		189.750.000		189.750.000	
jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	200	200	189.750.000	200	189.750.000	200	189.750.000	200	189.750.000	200	189.750.000	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	40	40		40		40		40		40		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	40	40		40		40		40		40		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				109.750.000		109.750.000		109.750.000		109.750.000		109.750.000		
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	200	200	109.750.000	200	109.750.000	200	109.750.000	200	109.750.000	200	109.750.000		
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	40	40	40.000.000	40	40.000.000	40	40.000.000	40	40.000.000	40	40.000.000		
7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		

Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	40	40	40.000.000	40	40.000.000	40	40.000.000	40	40.000.000	40	40.000.000		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Berbek	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa (%)	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Berbek	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Persentase Desa dengan tertib administrasi kelembagaan desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	19	19	100.000.000	19	100.000.000	19	100.000.000	19	100.000.000	19	100.000.000		
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	19	19		19		19		19		19			
7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	19	19	50.000.000	19	50.000.000	19	50.000.000	19	50.000.000	19	50.000.000		
7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		

Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	19	19	50.000.000	19	50.000.000	19	50.000.000	19	50.000.000	19	50.000.000		
Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di kecamatan Berbek	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (%)	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000		
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	19	19	100.000.000	19	100.000.000	19	100.000.000	19	100.000.000	19	100.000.000		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	19	19		19		19		19		19			
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	57	57		57		57		57		57			
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	19	19	30.000.000	19	30.000.000	19	30.000.000	19	30.000.000	19	30.000.000		
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	19	19	20.000.000	19	20.000.000	19	20.000.000	19	20.000.000	19	20.000.000		

7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	57	57	50.000.000	57	50.000.000	57	50.000.000	57	50.000.000	57	50.000.000	

TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Berbek										
I	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									
1	Indeks Sinergitas Kecamatan	Nilai	84,5	85	85	86	87	88	88	

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH RENSTRA

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Berbek				
1.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Berbek	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA

RENSTRA PD

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Berbek									
2.	Indeks Sinergitas Kecamatan	Nilai	84,5	85	85	86	87	88	88	
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai	84,5	85	85,5	85,6	85,7	86	86,5	
4.	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	%	90	91	92	95	95	95	95	
5.	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	%	89	20	20	20	20	15	15	

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI

RENSTRA

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.	7.01 – KECAMATAN										
2.	Indeks Sinergitas Kecamatan		Nilai	84,5	85	85	86	87	88	88	

Selanjutnya berbagai target kinerja yang meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana dituang dalam tabel-tabel di atas menjadi acuan dalam penyusunan target kinerja
dalam dokumen perencanaan Perangkat daerah, baik perencanaan jangka menengah (Rencana Strategis Perangkat Daerah) maupun rencana jangka pendek (Rencana Kerja Perangkat Daerah).

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah dimaksud diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dimaksud diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil *(result oriented)* dan berdampak, disusun dengan menggunakan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* pelayanan Kecamatan Berbek.

Untuk menjamin keberhasilan pencapaian target kinerja Rencana Strategis Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 agar dipedomani dan menjaga konsistensinya dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya, serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah berbasis manajemen risiko pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Rencana Strategis Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 disusun guna sinkronisasi dan sinergi urusan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001